
PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN

PEMBINAAN USAHA KECIL MENENGAH DAN KOPERASI MELALUI PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN PENGEMBANGAN BISNIS/BUSINESS DEVELOPMENT SERVICE (BDS)

Oleh : Purwanto *)

ABSTRAK

Dalam upaya mendorong laju pertumbuhan ekonomi Indonesia selayaknyalah UKMK mendapat perhatian khusus karena sudah terbukti nyata bahwa ketangguhan UKMK dalam menghadapi badai krisis sudah teruji. Dengan beberapa kendala dan peluang yang dimiliki UKMK maka dirancang strategi pengembangan UKMK. Ada dua pendekatan dalam strategi pengembangan bisnis UKMK yaitu rescue (penyelamatan) dan development (pengembangan). Dalam upaya strategi dirancang program pengembangan melalui Lembaga Penyedia Jasa Layanan Pengembangan Bisnis atau Business Development Service (BDS) dilakukan restrukturisasi UKMK secara menyeluruh diberbagai bidang antara lain : Perbaikan manajemen, produksi keuangan dan pemasaran. Ukuran keberhasilan LPB/BDS adalah : Omset penjualan UKMK meningkat, Jumlah unit usaha dalam sentra bertambah dan berkurangnya pengangguran.

A. PENDAHULUAN

Peranan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi dalam perekonomian Nasional cukup besar. Hal ini dibuktikan pada saat ekonomi Nasional dilanda krisis pada bulan Agustus 1997, dimana terjadinya krisis moneter berlanjut menjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan. Dampak krisis ekonomi tersebut masih dirasakan sampai saat ini. Krisis ekonomi yang berkepanjangan disebabkan tatanan ekonomi Indonesia pada masa orde baru mendorong timbulnya usaha besar atau disebut dengan konglomerat atau dikenal dengan membesarkan kue nasional terlebih dahulu baru kue tersebut dibagi-bagi.

Tatanan ekonomi yang dibangun sekian puluh tahun tidaklah sekuat

apa yang dibayangkan karena dengan adanya krisis moneter pada bulan Agustus 1997 yang berkelanjutan dengan krisis ekonomi, telah menyebabkan usaha besar yang disebut dengan konglomerat telah jatuh bangkrut yang mengakibatkan pengangguran meningkat demikian tajam yaitu mencapai ± 40 juta orang.

Dalam keadaan yang sulit tersebut dimana hampir semua kegiatan ekonomi lumpuh secara total, maka Pengusaha Kecil Menengah dan Koperasi tampil sebagai penyelamat ekonomi nasional, dimana sejak tahun 1999 perekonomian telah tumbuh secara positif yaitu 4% s.d 5% pertahun.

Di samping Pengusaha Kecil Menengah dan Koperasi yang telah menyelamatkan perekonomian

*) Purwanto, S.Si adalah Dosen FMIPA UNIMED

PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN

Nasional dan di sisi lain yang tidak kalah pentingnya adalah jumlah Pengusaha Kecil Menengah dan Koperasi yang demikian besar, hal ini terlihat dalam data statistik yang dimiliki oleh Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah pada tahun 1998 jumlah pengusaha secara nasional sebanyak 1,8 juta. Pengusaha Kecil Menengah dan Koperasi masih mempunyai permasalahan dan secara garis besar dapat diuraikan beberapa permasalahan pokok yang dihadapi oleh dunia UKMK dalam mengembangkan usahanya yaitu:

Kendala utama yang merupakan kendala interna Pengusaha Kecil adalah kemampuan, keterampilan dan keahlian Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah.

Adanya beberapa kecenderungan dan tantangan dalam era globalisasi yang ditandai dengan ketatnya persaingan.

Di samping kendala internal, pengusaha kecil masih juga dihadapkan pada kendala eksternal, kendala-kendala tersebut menyangkut iklim berusaha yang kurang kondusif, prasarana, pola pembinaan yang kurang terpadu.

Selain kendala tersebut di atas terdapat berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha kecil dimasa mendatang antara lain :

Adanya kemampuan politik yang kuat dari pemerintah dan tuntutan dari masyarakat untuk membangun sistem ekonomi yang demokratis dan berdasarkan azas kekeluargaan, manifestasinya ditentukan oleh berbagai kebijaksanaan moneter dan ekonomi, perkreditan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi yang terus membaik dan membuka berbagai peluang usaha dan semakin meningkatnya daya beli masyarakat.

Berlangsungnya proses transisi dan globalisasi ekonomi akan memperluas bidang-bidang usaha yang dapat ditangani oleh pengusaha kecil menengah dan koperasi.

Semakin berkembangnya semangat keterbukaan dan demokratisasi akan meningkatkan perkembangan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi (UKMK).

Untuk memanfaatkan potensi dari peluang Usaha Kecil Menengah dan Koperasi dalam memperkuat strukturisasi perekonomian nasional pemerintah telah melakukan berbagai upaya mem-berdayakan usaha kecil, sebagai bentuk pemerataan iklim usaha, untuk menciptakan pengusaha kecil menengah dan koperasi yang tangguh dan mandiri. Salah satu cara yang ditempuh pemerintah adalah membina dan mengembangkan usaha kecil menengah melalui Layanan Pengembangan Bisnis (LPB) atau Business Development Service (BDS).

Untuk meningkatkan layanan pemerintah pada usaha kecil dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan secara fokus, sehingga dalam melakukan pembinaan dan pengembangan lebih efektif dan efisien dalam penggunaan Anggaran Belanja Negara.

B. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Adapun tujuan dilaksanakan kegiatan Layanan Pengembangan Bisnis (LPB) atau Business Development Service (BDS) adalah :

PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN

Meningkatkan pelayanan pemerintah terhadap pengembangan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi (UKMK).

Meningkatnya kemampuan dan status Pengusaha Kecil Menengah dan Koperasi sehingga pembinaan terhadap pengusaha kecil dan menengah dapat terwujud.

Meningkatkan dan mengembangkan daya saing serta jiwa kewiraswastaan pengusaha kecil yang potensial di Propinsi Sumatera Utara.

Meningkatkan pelaksanaan tertib administrasi keuangan di lingkungan Pengusaha Kecil Menengah dan Koperasi.

Mempercepat terwujudnya ekonomi rakyat yang dicanangkan oleh MPR melalui TAP MPR No. XVI tahun 1998.

2. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

a. Sentra Pengusaha Kecil.

Teridentifikasinya sentra Pengusaha Kecil berdasarkan kriteria sebagai berikut :

Telah membina minimal 25 pengusaha kecil selama 1 tahun.

Memiliki kemampuan membina pengusaha kecil.

Lokasi sentra berada di sekitar pengusaha kecil.

Telah memiliki jaringan usaha.

b. Pengusaha Kecil

Teridentifikasi potensi dan permasalahan pengusaha kecil dalam satu sentra berdasarkan kriteria sebagai berikut :

Mempunyai prospek berkembang

Telah memiliki tempat usaha yang tetap

Memiliki wawasan ke depan

Sumber daya manusia yang memadai

Usaha perdagangan/distribusi yang luas

Aset dan modal yang cukup memadai

Memiliki karyawan tetap

C. LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENGEMBANGAN BISNIS (LPLPB)

Lembaga Penyedia Jasa Layanan Pengembangan Bisnis (LPLPB) atau sering disebut dengan Bisnis Development Servis (BDS) adalah institusi/badan usaha yang mempunyai komitmen dan kemampuan menyediakan jasa layanan pengembangan bisnis kepada UKMK. Institusi/badan usaha yang dapat menjadi LPLPB antara lain : Badan usaha yang berbadan hukum, Yayasan, Perguruan tinggi.

LPLPB bertugas untuk memberikan layanan pengembangan bisnis pada sentra UKMK pilihan meliputi: Layanan informasi, Layanan Konsultasi, Layanan Pelatihan, Melakukan Bimbingan/ pendampingan, Menyelenggarakan kontak bisnis, Fasilitasi dalam memperluas pasar, Fasilitasi dalam memperoleh permodalan, Fasilitasi dalam pengembangan organisasi dan manajemen, Fasilitasi dalam pengembangan teknologi, Penyusunan proposal pengembangan bisnis.

Pada prinsipnya satu LPLPB melayani satu sentra UKMK, namun bagi LPLPB yang mampu dimungkinkan melayani lebih dari satu sentra. Dalam memudahkan layanan LPLPB berada dalam lingkungan sentra untuk membantu mengembangkan bisnis UKMK sehari-hari.

LPLPB berorientasi pada pasar dan menerapkan pendekatan bisnis yang dikelola secara profesional dimana UKMK sebagai pelanggan harus

PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN

memperoleh manfaat dan atas manfaat yang diperoleh maka UKM harus membayar jasa pelayanan dimaksud.

Kriteria pemilihan Lembaga Penyedia Layanan Pengembangan Bisnis (LPLPB) adalah sebagai berikut:

Jelas keberadaannya, badan hukumnya, orang-orangnya serta reputasinya.

Mempunyai riwayat baik dalam pembinaan dan pengembangan UKM. Mempunyai komitmen pengalaman dan kompetensi dalam pengembangan UKM.

Dikelola secara profesional.

Memiliki pola pendanaan yang jelas dan pembagian risikonya serta mampu menghidupi dirinya sendiri.

D. STRATEGI PENGEMBANGAN BISNIS

Strategi pengembangan bisnis UKM dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan yaitu :

1. Rescue (Penyelamatan)

Dengan melakukan restrukturisasi usaha bagi UKM yang mempunyai permasalahan, sehingga dapat mengganggu arus kas dan di khawatirkan tidak mampu menyelesaikan masalah kreditnya.

2. Development (Pengembangan)

Melalui kegiatan konsultasi yang dilakukan oleh LPLPB/BDS terhadap UKM maka ditargetkan UKM akan mampu berkembang menjadi sentra yang prospektif dan akhirnya menjadi klaster.

Restrukturisasi dilakukan secara menyeluruh seperti perbaikan manajemen, produksi dan keuangan, sehingga dapat disusun proposal bisnis yang komprehensif dan berkelanjutan guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Untuk melakukan restrukturisasi usaha ini

dilakukan pembentukan tim yang keanggotaannya berasal dari unsur-unsur pelaku usaha, perbankan, profesional dan pihak pemerintah. Tim ini diharapkan mampu menghasilkan kebijakan nasional yang dapat membantu UKM melakukan restrukturisasi usahanya, sebagaimana yang terjadi pada usaha-usaha besar.

Pendekatan melalui sentra didasarkan pada pemikiran untuk memberikan layanan kepada UKM secara lebih fokus kolektif dan efisien karena dengan sumberdaya yang terbatas mampu menjangkau kelompok UKM yang lebih luas. Pendekatan ini juga mempunyai efektivitas yang tinggi, karena jelas sasarannya dan unit usaha yang ada pada sentra umumnya dicirikan dengan permasalahan yang sama, baik dari sisi produksi, pemasaran, teknologi, dan lain-lain.

Untuk mencapai tujuan pengembangan UKM, yaitu peningkatan efisiensi dan daya saing, maka sumberdaya yang dialokasikan pada sentra meliputi dukungan kebijakan untuk menciptakan iklim yang kondusif, dukungan finansial dalam bentuk modal awal dan padanan (MAP) dan dukungan non finansial berupa Layanan Pengembangan Bisnis (LPB)/Business Development Service (BDS), pelatihan dan penyuluhan.

E. PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA

Program pengembangan UKM sebagaimana diuraikan di bawah ini merupakan lingkup kebijakan pengembangan bisnis UKM untuk diimplementasikan oleh berbagai

PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN

Pengembangan kerjasama luar negeri sebagai upaya untuk menunjang langkah-langkah pemberdayaan UKMK, antara lain dengan memanfaatkan technical assistance untuk pengembangan klaster UKMK di beberapa daerah.

Peningkatan koordinasi lintas sektoral, dilakukan secara intensif dengan berbagai pihak, terutama dengan instansi pemerintah yang berkaitan, perbankan, asosiasi, Pemda, gerakan koperasi dan lainnya.

F. SIMPULAN

Dengan beberapa kendala dan peluang yang dimiliki UKMK maka dilakukan dua pendekatan dalam strategi pengembangan bisnis UKMK yaitu rescue (penyelamatan) dan development (pengembangan). Untuk pelaksanaannya dirancang program pengembangan melalui Bantuan jasa konsultan Lembaga Penyedia Jasa Layanan Pengembangan Bisnis atau Business Development Service (BDS). Kemudian dilakukan restrukturisasi UKMK secara menyeluruh diberbagai bidang antara lain : Perbaikan manajemen, produksi keuangan dan pemasaran. Ukuran keberhasilan LPB/BDS adalah : Omset penjualan UKMK meningkat, Jumlah unit usaha dalam sentra bertambah dan berkurangnya pengangguran. Setelah diterapkan program pengembangan UKMK melalui jasa LPB/BDS maka akan terlihat perubahan dalam mekanisme usaha UKMK yang ditandai dengan :

Meningkatnya pelayanan pemerintah terhadap pengembangan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi (UKMK).

Meningkatnya kemampuan dan status Pengusaha Kecil Menengah dan Koperasi sehingga pembinaan

terhadap pengusaha kecil dan menengah dapat terwujud.

Meningkatnya daya saing serta jiwa kewiraswastaan pengusaha kecil yang potensial di Propinsi Sumatera Utara.

Meningkatnya pelaksanaan tertib administrasi keuangan di lingkungan Pengusaha Kecil Menengah dan Koperasi.

Terwujudnya ekonomi rakyat yang dicanangkan oleh MPR melalui TAP MPR No. XVI tahun 1998.

DAFTAR PUSTAKA

Kartiwa, Suwati, 1984. Tenun Ikat Indonesia Ikats, Jakarta: Penerbit Djambatan.

....., 1997. Kamus Budaya Batak Toba. Jakarta: Balai Pustaka.

....., 1997. Pedoman Ilmu Pelaksanaan Adat Batak Toba, Medan: Produksi Bintang Inc.

....., 1999. Panduan Program Pengembangan Budaya Kewirausahaan di Perguruan Tinggi. Jakarta: Direktorat P4M, Dirjen Dikti, Depdikbud.

....., 2001. Strategi Pengembangan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi. Jakarta: Badan Pengembangan Sumberdaya Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.